

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

I. PERKEMBANGAN INFLASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN I

- a. Perkembangan tingkat inflasi provinsi tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK). Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 4 Kota IHK sebagai representasi tingkat inflasi provinsi, yakni Kota Kendari, Kota BauBau, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Kolaka.
- b. Pada triwulan I 2026, inflasi gabungan di wilayah Sulawesi Tenggara tercatat mengalami inflasi tahun ke tahun sebesar 3,37% (yoy), naik dibandingkan triwulan IV 2025 yang sebesar 2,86% (yoy). Secara bulanan, pada bulan Januari 2026 mengalami inflasi sebesar 0,69%, pada bulan Februari 2026 mengalami Inflasi sebesar 0,65%, dan pada bulan Maret 2025 mengalami inflasi sebesar 0,41%. Adapun perkembangan inflasi dapat dilihat pada BPS Sulawesi Tenggara mulai Januari 2025 hingga Maret 2025 sebagai berikut:

Januari 2026

- Pada Januari 2026, IHK Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami inflasi sebesar 0,69% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan Desember 2025 yang mengalami inflasi sebesar 0,22% (mtm), berbeda arah dibandingkan Nasional yang mengalami deflasi sebesar 0,15% (mtm). Berbeda arah dari rata-rata inflasi bulanan Januari selama tiga tahun terakhir yaitu deflasi sebesar 0,59% (mtm). Inflasi bulanan pada Januari 2025 disebabkan oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,40% (mtm) dengan andil sebesar 0,45% (mtm), lebih tinggi dibandingkan Desember 2025 yang mengalami inflasi sebesar 0,43% (mtm) dengan andil sebesar 0,14% (mtm). Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau didorong oleh peningkatan harga komoditas ikan tangkap, seperti ikan cakalang, ikan layang, ikan kembung, dan ikan selar akibat kurang baiknya cuaca dan relatif tingginya gelombang di atas 1,5 meter sehingga menahan nelayan untuk melaut.
- Deflasi yang lebih dalam diperkirakan tertahan oleh peningkatan harga beras didorong semakin berkurangnya stok musim panen Oktober 2025, sementara musim panen selanjutnya baru akan terjadi pada bulan April 2026. Inflasi juga didorong oleh kenaikan harga komoditas hortikultura dan sayuran akibat kenaikan permintaan pada momen Ramadan. Inflasi juga didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan mengikuti kenaikan harga emas global karena peningkatan permintaan di era ketidakpastian global dan masih berlanjutnya ketegangan geopolitik. Lebih lanjut, inflasi juga didorong oleh berlanjutnya pencairan bansos untuk peningkatan daya beli masyarakat pada Januari 2026 yang terdiri dari beberapa program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I 2026 untuk membantu anak sekolah dan lansia serta penyandang disabilitas berat, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia dini, Program Indonesia Pintar (PIP) yang berupa bantuan pendidikan kepada siswa SD, SMP, dan SMA dari keluarga kurang mampu, Bansos Inflasi Rp 600.000 untuk kelompok rentan, dan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp 900.000 untuk keluarga miskin ekstrem.
- Prospek inflasi IHK di tahun 2026 diperkirakan menurun dibandingkan tahun sebelumnya namun tetap berada di rentang sasaran inflasi Nasional sebesar $2,5\% \pm 1\%$. Kebijakan pemerintah tahun 2026 terkait peningkatan pelaksanaan program makanan

bergizi gratis dan kenaikan UMP berdasarkan perhitungan baru diperkirakan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat ataupun pemerintah yang berdampak pada potensi inflasi di tahun 2026. Kenaikan UMP tahun 2026 mencapai 7,58% berdampak baik pada daya beli masyarakat sehingga dapat mendorong percepatan konsumsi masyarakat yang akan mendorong inflasi inti.

INFLASI JANUARI 2026

No	Kota Inflasi/ Keterangan	Inflasi Bulan ke Bulan (MTM%)	Inflasi Tahun Kalender (YTD%)	Inflasi Tahun ke Tahun (YOY%)
1	Kota Kendari	0,44%	0,44%	4,97%
2	Kota Baubau	0,90%	0,90%	4,92%
3	Kabupaten Konawe	-0,06%	-0,06%	3,79%
4	Kabupaten Kolaka	1,82%	1,82%	6,75%
5	Inflasi Gabungan 4 Kota IHK	0,69%	0,69%	5,10%
6	Nasional	-0,15%	-0,15%	3,55%

Andil Beberapa Jenis Komoditas Terhadap Inflasi/Deflasi Januari 2026

TOP 5 KOMODITAS PENYUMBANG INFLASI % MTM

Emas Perhiasan	Ikan Cakalang	Ikan Lajang	Ikan Kembung	Ikan Selar
0,25%	0,10%	0,10%	0,06%	0,04%

TOP 5 KOMODITAS PENYUMBANG DEFLASI % MTM

Cabai Rawit	Bensin	Cabai Merah	Angkutan Udara	Kacang Panjang
-------------	--------	-------------	----------------	----------------

-0,08%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,02%
--------	--------	--------	--------	--------

TOP 5 KOMODITAS PENYUMBANG INFLASI % YOY

Tarif Listrik	Emas Perhiasan	Beras	Ikan Layang	Akademi Perguruan Tinggi
1,71%	0,95%	0,47%	0,32%	0,16%

TOP 5 KOMODITAS PENYUMBANG DEFLASII % YOY

Tomat	Cabai Rawit	Kacang Panjang	Ikan Mujair	Tempe
-0,11%	-0,07%	-0,04%	-0,04%	-0,03%

Februari 2026

- Inflasi Sulawesi Tenggara Februari 2026 mengalami inflasi sebesar 0,65% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan Januari 2026 yang mengalami inflasi sebesar 0,69% (mtm), serta lebih rendah dibandingkan Nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,68% (mtm).
- Inflasi bulanan pada Februari 2026 disebabkan oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,21% (mtm) dengan andil sebesar 0,40% (mtm), lebih rendah dibandingkan Januari 2026 yang mengalami inflasi sebesar 1,40% (mtm) dengan andil sebesar 0,45% (mtm). Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau didorong oleh peningkatan harga komoditas ikan tangkap, seperti ikan kembung, ikan selar, dan ikan cakalang sebagai dampak dari meningkatnya permintaan oleh masyarakat memasuki momen Ramadan.
- Inflasi Februari 2026 turut didorong oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang juga mengalami inflasi sebesar 2,15% (mtm) dengan andil sebesar 0,40% (mtm), lebih rendah dibandingkan Januari 2026 yang mengalami inflasi sebesar 2,80% (mtm) dengan andil sebesar 0,24% (mtm) karena peningkatan harga emas perhiasan sejalan dengan peningkatan harga emas global di era meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan masih berlangsungnya ketegangan geopolitik.
- Namun demikian inflasi lebih tinggi tertahan oleh kelompok Pendidikan yang mengalami

deflasi sebesar 0,50% (mtm) dengan andil sebesar -0,02% (mtm), berbalik arah dibandingkan Januari 2026 yang mengalami inflasi sebesar 0,13% (mtm) dengan andil sebesar -0,01% (mtm) didorong oleh telah berlalunya masa awal semester baru perguruan tinggi.

- Inflasi pada Maret 2026 diperkirakan didorong oleh peningkatan harga beras didorong semakin berkurangnya stok musim panen Oktober 2025 di tengah momen Ramadan-Idulfitri, sementara musim panen selanjutnya baru akan terjadi pada bulan April 2026.
- Inflasi yang lebih tinggi diperkirakan tertahan oleh penurunan tarif angkutan udara sebesar 17-18% periode 14 - 29 Maret 2026 dan angkutan laut sebesar 30% periode 11 Maret - 5 April 2026 melalui Program Stimulus Ekonomi I-2026. Bantuan Pangan Non Tunai juga membantu menurunkan permintaan pangan di pasar oleh masyarakat melalui penyaluran beras 10 kg/bulan per keluarga dan kartu sembako Rp 200.000 per bulan. Peningkatan penyaluran beras SPHP sebagai harga penyeimbang di pasar juga akan menahan kenaikan harga beras lebih tinggi di mana hingga 26 Februari 2026 Bulog Kanwil Sultra telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 25.847,9 ton atau 124,41% dari target 2025. Selain itu, diskon pakaian muslim yang umum terjadi selama momen Ramadan-Idulfitri diperkirakan juga turut menahan laju inflasi bulanan yang lebih tinggi.
- Secara keseluruhan, inflasi IHK tahun 2025 diperkirakan menurun dibandingkan tahun sebelumnya namun tetap berada di rentang sasaran inflasi Nasional sebesar $2,5\% \pm 1\%$. Kebijakan pemerintah tahun 2026 terkait peningkatan pelaksanaan program makanan bergizi gratis dan kenaikan UMP berdasarkan perhitungan baru diperkirakan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat ataupun pemerintah yang berdampak pada potensi inflasi di tahun 2026.
- Namun inflasi lebih tinggi pada 2026 akan tertahan oleh penurunan tarif angkutan udara akibat penambahan frekuensi dan jalur penerbangan baru pada 2026, yaitu Makassar-Kendari oleh maskapai Air Asia yang meningkatkan persaingan pasar angkutan udara di Sulawesi Tenggara. Program cetak sawah sebesar 6.745 Ha yang berlanjut pada 2026 diperkirakan akan mulai panen pada triwulan III 2026 akan menambah pasokan beras. Selain itu, BMKG memprakirakan bahwa kondisi cuaca pada tahun 2026 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga akan berdampak kepada produksi pertanian dan perikanan yang lebih optimal. Curah hujan pada tahun 2026 diperkirakan berada pada rentang kondisi normal sehingga berdampak kepada kecilnya kemungkinan gagal panen pada berbagai komoditas pertanian.
- Pemerintah daerah melalui TPID Sultra terus melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi dengan memperkuat strategi 4K: Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Kegiatan yang dilakukan meliputi operasi pasar murah, sidak pasar, kerja sama antar daerah, panen raya, penanaman hortikultura, serta koordinasi dan diseminasi informasi kepada publik.

INFLASI FEBRUARI 2026

No	Kota Inflasi/ Keterangan	Inflasi Bulan ke Bulan (MTM%)	Inflasi Tahun Kalender (YTD%)	Inflasi Tahun ke Tahun (YOY%)
1	Kota Kendari	0,38%	0,83%	4,88%
2	Kota Baubau	1,44%	2,35%	6,21%
3	Kabupaten Konawe	0,28%	0,22%	3,57%
4	Kabupaten Kolaka	1,05%	2,88%	7,77%
5	Inflasi Gabungan 4 Kota IHK	0,65%	1,35%	5,41%
6	Nasional	0,68%	0,53%	4,76%

Andil Beberapa Jenis Komoditas Terhadap Inflasi/Deflasi

TOP 5 KOMODITAS PENYUMBANG INFLASI % MTM

Emas Perhiasan	Ikan Kembung	Ikan Selar	Angkutan Udara	Ikan Cakalang
0,19 %	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%

TOP 5 KOMODITAS PENYUMBANG DEFLASI % MTM

Bensin	Bawang Merah	Akademi Perguruan Tinggi	Mie Keriting Instan	Telepon Seluler
-0,04%	-0,03%	-0,02%	-0,01%	-0,01%

TOP 5 KOMODITAS PENYUMBANG INFLASI % YOY

Tarif Listrik	Emas Perhiasan	Ikan Layang	Beras	Angkutan Udara
2,13 %	1,09%	0,30%	0,26%	0,15%

TOP 5 KOMODITAS PENYUMBANG DEFLASII % YOY

Bensin	TOMAT	Cabai Rawit	Ikan Mujair	Bahan Bakar Rumah Tangga
0,08%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%

Maret 2026

- Pada Maret 2026, IHK Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami inflasi sebesar 0,41% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan Februari 2026 yang mengalami inflasi sebesar 0,65% (mtm), serta sama dengan capaian Nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,41% (mtm). Realisasi tersebut lebih rendah dari rata-rata inflasi bulanan Maret selama tiga tahun terakhir yaitu inflasi sebesar 1,17% (mtm);
- Inflasi Sulawesi Tenggara bulan Maret 2026 turut didorong oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang juga mengalami inflasi sebesar 1,26% (mtm) dengan andil sebesar 0,15% (mtm), lebih tinggi dibandingkan Februari 2026 yang mengalami inflasi sebesar 0,16% (mtm) dengan andil sebesar 0,02% (mtm) karena meningkatnya harga bahan bakar rumah tangga sebagai dampak dari meningkatnya permintaan oleh masyarakat selama momen Ramadan dan Idulfitri untuk memasak;
- Inflasi lebih tinggi tertahan oleh Kelompok Transportasi yang mengalami deflasi sebesar 0,56% (mtm) dengan andil sebesar -0,09% (mtm), berbalik arah dibandingkan Februari 2026 yang mengalami inflasi sebesar 0,24% (mtm) dengan andil sebesar 0,04% (mtm) disebabkan kebijakan diskon tarif angkutan udara dan angkutan laut yang berlaku pada 11 - 29 Maret 2026;
- Pada April 2026 Deflasi diperkirakan berada pada kisaran -0,05% s.d -0,01% (mtm). Deflasi diperkirakan terjadi seiring dengan meningkatnya produksi beras pada puncak musim panen padi pada bulan April dan Mei 2026 yang disertai dengan tetap disalurkan beras SPHP oleh Bulog. Peningkatan penyaluran beras SPHP sebagai harga penyeimbang di pasar yang hingga 30 Maret 2026 Bulog Kanwil Sultra telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 650,59 Ton atau 4,01% dari target kuota 2026. Kembali normalnya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan bahan pangan pasca momen Ramadan dan Idulfitri diperkirakan Akan berdampak kepada kembali turunnya harga komoditas pangan bergejolak atau *volatile food* (VF);
- Untuk mengendalikan inflasi, TPID Sulawesi Tenggara dan mitra strategis melakukan berbagai upaya ekstra seperti operasi pasar, kerjasama antar daerah, pemberian subsidi angkutan, dan gerakan tanam di berbagai Program strategis lainnya mencakup penyediaan lahan dan fasilitas tanam oleh TNI, pengembangan koperasi, optimalisasi Perumda, dan aplikasi monitoring harga. Koordinasi antarlembaga dan upaya komunikasi yang efektif juga diharapkan dapat menahan laju inflasi lebih tinggi;

Prospek inflasi IHK di tahun 2026 diperkirakan menurun dibandingkan tahun sebelumnya namun tetap berada di rentang sasaran inflasi Nasional sebesar $2,5\% \pm 1\%$. Kebijakan pemerintah tahun 2026 terkait peningkatan pelaksanaan program makanan bergizi gratis dan kenaikan UMP berdasarkan perhitungan baru diperkirakan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat ataupun pemerintah yang berdampak pada potensi inflasi di tahun 2026.

INFLASI MARET 2026

No	Kota Inflasi/ Keterangan	Inflasi Bulan ke Bulan (MTM%)	Inflasi Tahun ke Kalender (YTD%)	Inflasi Tahun ke Tahun (YOY%)
1	Kota Kendari	0,33%	1,16%	2,95%
2	Kota Baubau	-0,75%	1,59%	3,12%
3	Kabupaten Konawe	1,14%	1,36%	1,81%
4	Kabupaten Kolaka	0,78%	3,69%	6,02%
5	Inflasi Gabungan 4 Kota IHK	0,41%	1,77%	3,37%
6	Nasional	0,41%	0,94%	3,48%

Andil Beberapa Jenis Komoditas Terhadap Inflasi/Deflasi

TOP 5 KOMODITAS PENYUMBANG INFLASI % MTM

Bahan Bakar Rumah Tangga	Beras	Ikan Cakalang	Tomat	Telur Ayam Ras
0,13%	0,11%	0,09%	0,06%	0,06%

TOP 5 KOMODITAS PENYUMBANG DEFLASI % MTM

Ikan Layang	Angkutan Udara	Emas Perhiasan	Ikan Selar	Angkutan Laut
-0,14%	-0,11%	-0,05%	-0,04%	-0,03%

TOP 5 KOMODITAS PENYUMBANG INFLASI % YOY

Emas Perhiasan	Tarif Listrik	Ikan Cakalang	Angkutan Udara	Sigaret Kretek Mesin (SKM)
0,96%	0,68%	0,17%	0,16%	0,16%

TOP 5 KOMODITAS PENYUMBANG DEFLASII % YOY

Ikan Mujair	Cabai Rawit	Bensin	Cabai Merah	Angkutan Laut
-0,09%	-0,08%	-0,04%	-0,04%	0,03%

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

II. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

PENGENDALIAN INFLASI DI SULAWESI TENGGARA

- Kenaikan harga komoditas hortikultura:

Kenaikan harga komoditas hortikultura sebab terbatasnya pasokan dari daerah pemasok akibat El Nino

- Kenaikan Harga Emas dan Avtur :

Kenaikan harga emas perhiasan dan harga avtur yang berdampak kepada naiknya tarif angkutan udara sejalan dengan tren peningkatan harga emas global yang masih berlanjut serta prospek peningkatan harga minyak dunia di triwulan II 2026

- Resiko inflasi dari sisi permintaan:

Peningkatan daya beli masyarakat seiring implementasi kebijakan insentif fiskal pemerintah, khususnya pennebalan bantuan sosial, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I 2026, serta bantuan langsung tunai (BLT), Dana Desa yang berpotensi meningkatkan konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek, terutama pada kelompok makanan, minuman dan kebutuhan harian

- Tekanan inflasi inti:

Akibat penyesuaian struktural upah sebagai dampak dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tenggara 2026. Dengan kenaikan sekitar 7,58% dibandingkan 2025

- Inflasi Permintaan :

Resiko Inflasi permintaan yang persisten seiring era suku bunga rendah global dan domestik seiring dengan adanya potensi penurunan Federal Funds Rate (FFR) hingga akhir 2026

- Tekanan inflasi :

Tekanan inflasi dari tren kenaikan harga emas global yang berkelanjutan terutama di tengah era penurunan suku bunga.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

III. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI (4K) DI SULAWESI TENGGARA

K1. Keterjangkauan Harga

Pelaksanaan pasar murah sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga kebutuhan dasar sekaligus mendorong kelancaran distribusi melalui mekanisme subsidi ongkos angkut komoditas hortikultura yang disediakan di Pasar Murah antara lain:

- Terlaksananya Giat Pasar Murah sebanyak 23 kali

- Telah berdirinya Kios Pangan sebanyak 160 titik per akhir Januari 2026 di Kota Kendari
- Pemantauan harga harian oleh masing-masing TPID Kab/Kota
- Penyaluran beras SPHP sebanyak 25.847,9 hingga 26 Februari 2026 Ton oleh Bulog Kanwil Sultra
- Sidak pasar di setiap Kab/Kota pada Ramadan dan menjelang HBKN Idul fitri

K2. Ketersediaan Pasokan

Pelaksanaan berbagai program sidak pasar, penanaman benih komoditas strategis untuk menjamin ketersediaan Pasokan, serta kerja sama antar daerah di berbagai Kota/Kabupaten antara lain:

- Berlanjutnya program cetak sawah seluas 6.745 Ha
- Panen perdana benih padi Sanggoleo di Kab. Konawe
- Penyaluran benih padi unggul bersertifikat Sanggoleo secara gratis kepada kelompok tani

K3. Kelancaran Distribusi

Berbagai upaya pendorong kelancaran distribusi di wilayah Sulawesi Tenggara antara lain.

- Fasilitasi distribusi kios pangan di Kota Kendari, Kab. Buton Selatan, Kab. Wakatobi, Kab. Buton Utara, Kab. Muna, Kab. Konawe, Kab. Buton, dan Kab. Bombana
- Persiapan KAD antara Kolaka Timur dan dan Kendari (beras), KAD antara Pondok Pesantren Minhajut Konawe Selatan dan Kendari (beras), serta Konawe Selatan dan Kendari (telur ayam)

K4. Komunikasi Efektif

Berbagai upaya pendorong komunikasi efektif di wilayah Sulawesi Tenggara antara lain dilaksanakan berbagai rapat koordinasi untuk mendukung komunikasi efektif, sbb :

- *Capacity Building* Laporan TPID Award 2025
- Rapat Koordinasi TPID masing-masing Kab/Kota
- Rilis media melalui bincang media dan konferensi pers inflasi Sulawesi Tenggara
- Rapat Koordinasi Satgas Ketahanan Pangan bersama Bapanas

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

IV. EVALUASI KEBIJAKAN

- Memastikan ketersediaan stok pangan terutama komoditas aneka cabai, bawang merah, daging ayam ras dan telur ayam ras;
- Mendorong industrialisasi sektor peternakan, pertanian dan koperasi merah putih guna menjamin pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- Mendorong peningkatan produktivitas pertanian di antaranya dengan duplikasi dan perluasan agriculture best practices klaster-klaster percontohan;
- Mendorong peningkatan infrastruktur penyimpanan untuk menjaga kualitas komoditas hortikultura dan perikanan segar sehingga dapat diasarkan di luar musim panen;

Mendorong penerapan contract farming sebagai insentif petani untuk menanam mengingat permintaan yang terjaga terutama pada komoditas hortikultura yang memiliki risiko gagal panen tinggi;

- Meningkatkan produktivitas perikanan tangkap laut melalui penerapan teknologi INA-WIS bersinergi dengan BMKG serta memperkuat implementasi cold chain untuk menjaga ketersediaan.
- Meningkatkan Penempatan Kios Pangan di pasar perhitungan inflasi sebagai penyeimbang harga di pasar;
- Mengoptimalkan tim Satgas Pangan untuk pemantauan harga pangan serta BBM dan LPG tetap berada di kisaran HET di tingkatkan pengece distributor, dan produsen;
- Memastikan penerapan diskon transportasi dari Pemerintah Pusat di daerah untuk mengendalikan harga tarif angkutan darat , laut dan Udara;
- Mengintensifikasi gerakan pasar murah (GPM) melalui kerangka 4T, yaitu tepat lokasi, tepat sasaran, tepat komoditas dan tepat waktu.
- Meningkatkan realisasi Kerja sama Antar Daerah sesuai kebutuhan berdasarkan data neraca pangan;
- Mengoptimalkan pemanfaatan Neraca Pangan digital hasil sinergi Bapanas dan BI yang dapat membantu pengambilan kebijakan distribusi pangan yang sesuai kebutuhan;
- Meningkatkan akses jalan antar Kabupaten/Kota antara daerah sentra produksi pertanian dan sentra perdagangan untuk menurunkan biaya distribusi.
- Melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi secara periodik dan tepat waktu, terutama dalam menghadapi momen-momen dengan risiko inflasi tinggi, seperti masa liburan sekolah dan HBKN;
- Melakukan press release terjadwal terkait ketersediaan pasokan pangan dan himbuan belanja bijak kepada masyarakat untuk mengendalikan ekspektasi inflasi masyarakat;
- Melakukan pemantauan efektivitas kenaikan UMP 2026 sebesar 7,58% dalam meningkatkan daya beli masyarakat serta memperluas akses pembiayaan pelaku UMKM

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

V. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Beberapa rekomendasi pengendalian inflasi berdasarkan 4K sebagai berikut:

K1: Ketersediaan Pasokan

- Memastikan ketersediaan stok pangan terutama komoditas aneka cabai, bawang merah, daging ayam ras dan telur ayam ras;
- Mendorong industrialisasi sektor peternakan, pertanian dan koperasi merah putih guna menjamin pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- Mendorong peningkatan produktivitas pertanian di antaranya dengan duplikasi dan perluasan agriculture best practices klaster-klaster percontohan;
- Mendorong peningkatan infrastruktur penyimpanan untuk menjaga kualitas komoditas hortikultura dan perikanan segar sehingga dapat diasarkan di luar musim panen;
- Mendorong penerapan contract farming sebagai insentif petani untuk menanam mengingat permintaan yang terjaga terutama pada komoditas hortikultura yang memiliki risiko gagal panen tinggi;
- Meningkatkan produktivitas perikanan tangkap laut melalui penerapan teknologi INA-
-

WIS bersinergi dengan BMKG serta memperkuat implementasi cold chain untuk menjaga ketersediaan.

K2: Keterjangkauan Harga

- Penempatan Kios Pangan di pasar perhitungan inflasi sebagai penyeimbang harga di pasar;
- Mengoptimalkan tim Satgas Pangan untuk pemantauan harga pangan serta BBM dan LPG tetap berada di kisaran HET di tingkatkan pengece distributor, dan produsen;
- Memastikan penerapan diskon transportasi dari Pemerintah Pusat di daerah untuk mengendalikan harga tarif angkutan darat , laut dan Udara;
- Mengintensifikasi gerakan pasar murah (GPM) melalui kerangka 4T, yaitu tepat lokasi, tepat sasaran, tepat komoditas dan tepat waktu.

K3: Kelancaran Distribusi

- Meningkatkan realisasi Kerja sama Antar Daerah sesuai kebutuhan berdasarkan data neraca pangan;
- Mengoptimalkan pemanfaatan Neraca Pangan digital hasil sinergi Bapanas dan BI yang dapat membantu pengambilan kebijakan distribusi pangan yang sesuai kebutuhan;
- Meningkatkan akses jalan antar Kabupaten/Kota antara daerah sentra produksi pertanian dan sentra perdagangan untuk menurunkan biaya distribusi.

K4: Komunikasi Efektif

- Melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi secara periodik dan tepat waktu, terutama dalam menghadapi momen-momen dengan risiko inflasi tinggi, seperti masa liburan sekolah dan HBKN;
- Melakukan press release terjadwal terkait ketersediaan pasokan pangan dan himbauan belanja bijak kepada masyarakat untuk mengendalikan ekspektasi inflasi masyarakat;
- Melakukan pemantauan efektivitas kenaikan UMP 2026 sebesar 7,58% dalam meningkatkan daya beli masyarakat serta memperluas akses pembiayaan pelaku UMKM.